

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1997 tepatnya dalam *ASEAN Summit* yang diadakan di Kuala Lumpur, para kepala negara ASEAN menyepakati *ASEAN Vision 2020* yaitu mewujudkan kawasan yang stabil dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari sinilah muncul ide pembentukan komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: (1) *ASEAN Security Community*, (2) *ASEAN Economic Community*, (3) *ASEAN Socio-Cultural Community*, komunitas ini pada awalnya akan diterapkan secara penuh pada tahun 2020. Namun, dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan dari pemimpin negara-negara anggota ASEAN (Sholeh, 2013, hal. 1).

Konferensi percepatan menjadi tahun 2015 tersebut dilaksanakan di Bali dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IX ASEAN pada tahun 2003, konferensi tersebut merupakan sejarah baru bagi solidaritas kawasan Asia Tenggara dengan tercapainya kesepakatan *Bali Concord II*, dalam pertemuan itu juga menghasilkan *blue print AEC* yang intinya bahwa ASEAN sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi dan dapat disejajarkan dengan masyarakat Uni Eropa (Suatma, 2012, hal. 1-2)

Dalam *blue print* tersebut terdapat empat prioritas dalam kerangka *ASEAN Economic Community (AEC)* yaitu:

1. Adanya arus barang dan jasa yang bebas (*free flow good services*);
2. Ekonomi regional yang kompetitif (*competitive economic region*);
3. Perkembangan ekuitas ekonomi (*equitable economic development*);
4. Integrasi memasuki ekonomi global (*full integration into global economy*).

Blue print menggambarkan sebuah kesiapan dan langkah yang harus dicapai dan jadwal pembentukan AEC. dalam *blue print AEC* disebutkan telah memberikan kesempatan negara-negara yang belum siap menghadapi perdagangan bebas ini. Setiap enam bulan antara anggota ASEAN akan melakukan pertemuan guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan akan

membantu negara-negara yang belum siap seperti Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Dalam *blue print* ini setidaknya terdapat 12 sektor yang menjadi prioritas integrasi dalam AEC yaitu: Produk industri, jasa penerbangan, otomotif, *E-ASEAN*, elektronika, perikanan, peralatan kesehatan, produk berbahan baku karet, tekstil dan garmen, pariwisata, produk berbahan baku kayu, dan jasa logistik. Dengan adanya AEC, maka segala bentuk pajak dan tarif dihilangkan berdasarkan prioritas sektor yang disetujui, sedangkan segala faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal diizinkan bergerak bebas melewati tapal batas sepuluh negara anggota melalui pasar bersama (Suatma, 2012, hal. 2).

Seperti negara ASEAN lainnya, Indonesia kini juga tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara tersebut yang akan dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Ketika berlangsung *ASEAN Summit* ke-9 tahun 2003 ditetapkan *11 Priority Integration Sectors (PIS)*. Namun, pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Ke-7 sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan kelima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, *E-ASEAN*, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik (Wangke, Humphrey, 2014, hal. 5).

Dengan adanya kesepakatan tersebut sudah tentu akan memberikan peluang, tantangan dan ancaman bagi negara anggota ASEAN, bagi negara yang bisa bersaing merupakan sebuah peluang dan sebaliknya bagi negara yang tidak bisa bersaing maka ini merupakan ancaman. Kondisi Indonesia sampai dengan sekarang belum dapat dinyatakan sudah siap bahkan cenderung kesepakatan tersebut menjadi ancaman. Diantara negara-negara ASEAN ternyata kinerja daya saing Indonesia lebih buruk dari Thailand, kendati Thailand mengalami gejolak politik yang cukup lama, hal itu sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Daya Saing Negara-negara Anggota ASEAN Tahun 2014-2015

Negara	Peringkat
Singapura	2
Malaysia	20
Brunei	28
Thailand	31
Indonesia	35
Philipina	52
Vietnam	68
Laos	93
Cambodia	95
Myanmar	134

Sumber : World Economic Forum 2014-2015 (Kemenkeu, 2015)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 yang dikeluarkan *Word Economic Forum 2014-2015*, Indonesia hanya menempati peringkat ke-35 jauh dari Malaysia yang memiliki daya saing lebih baik pada peringkat ke-20, Brunei Darussalam menempati peringkat ke-28, Thailand berada di peringkat ke-31 bahkan Singapura berada pada peringkat ke-2.

Menurut *World Economic Forum (WEF)* daya saing adalah “*Competitiveness is defined as the set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the level of prosperity that can be earned by an economy*”. (Wef, 2015). Daya saing didefinisikan sebagai seperangkat institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Tingkat produktivitas pada gilirannya menentukan tingkat kesejahteraan yang dapat diperoleh dengan ekonomi.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya Indonesia belum siap menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC)*, daya saing yang tinggi dapat menggambarkan kondisi perekonomian yang baik, perhitungan daya saing sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kebijakan (pemerintah) dan pelaku ekonomi untuk menentukan arah perekonomiannya. Indonesia harus segera mempersiapkan diri lebih serius lagi dalam menghadapi kesepakatan AEC, bila kondisi ini tidak dapat diatasi maka akan menjadi bomerang bagi Indonesia.

Menurut Asisten Sekretaris Kabinet Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eddy Cahyono mengatakan dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, AEC akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. Disamping itu, pemberlakuan AEC 2015 mendatang dapat dijadikan peluang bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat semakin meningkatkan size ekonomi kawasan, dimana dalam studi *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, diprediksikan negara-negara ASEAN akan berpendapatan total 5,4 triliun dollar AS pada 2030 mendatang. Namun sebaliknya, pemberlakuan AEC 2015 akan dapat menjadikan kita sebagai pecundang belaka, yang ditandai dengan hanya menjadi pasar impor, dan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), apabila tanpa persiapan yang matang dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Beliau menambahkan produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi dan daya saing tinggi berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daya saing tinggi menuntut pemenuhan “prasyarat dasar” yang diantaranya meliputi infrastruktur, kualitas kelembagaan birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan (Setkab, 2014).

Melihat sangat pentingnya daya saing berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan AEC yang akan dimulai pada Tahun 2015. Diharapkan melalui Inpres tersebut peningkatan daya saing dapat terus ditingkatkan, utamanya dengan mengedepankan beberapa strategi dasar di antaranya:

1. Pengembangan industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN, pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengembangan industri kecil menengah, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Pengembangan pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian, dan peningkatan akses pasar;
3. Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing

- kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor;
4. Pengembangan energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak) sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik;
 5. Selain itu, masih ada sepuluh sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan perbankan, investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, tenaga kerja, kesehatan, perdagangan, kepariwisataan, dan kewirausahaan.

Strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi yang paling tepat untuk dilaksanakan di Indonesia untuk saat ini (Tedjasuksmana, 2014, hal. 190-191). Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

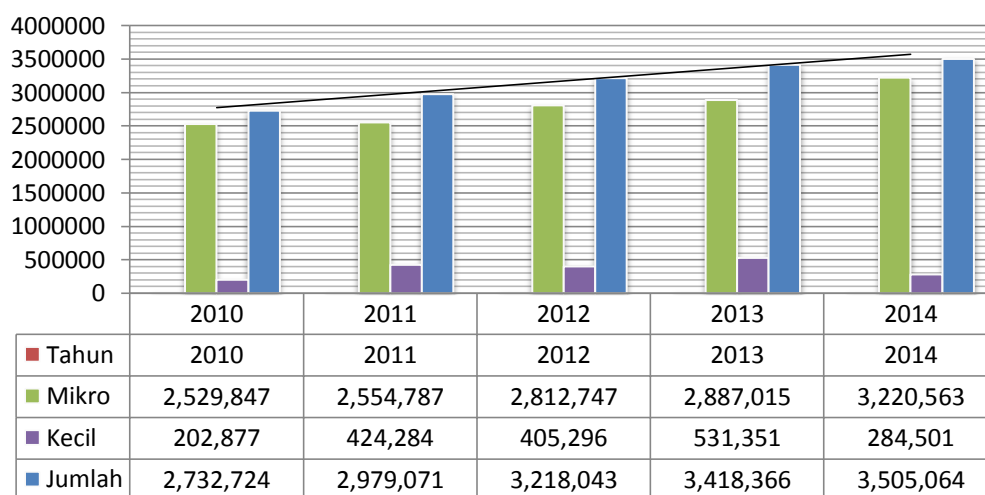
1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar;
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi;
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Menurut Bank Indonesia ditinjau dari sudut jumlah pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja, UMKM dapat dipandang sebagai tulang punggung perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, UMKM yang kuat, dinamis dan efisien akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bagi Indonesia peran UMKM merupakan sokoguru utama perekonomian. Hal ini dimungkinkan mengingat entitas usaha mikro mencakup baik sektor formal dan informal dengan karakteristik *barrier to entry and exit* yang rendah. Entitas skala usaha mikro ini juga yang berperan strategis sebagai jaring pengaman rakyat dalam menghadapi krisis dan turbulensi ekonomi (Aminati, 2009, hal. 1).

Salah satu yang masuk kedalam UMKM adalah sentra Industri Kecil dan Mikro (IKM) alas kaki. Perkembangan IKM sendiri di Indonesia dari tahun 2010-2014 terus mengalami pertumbuhan, seperti terlihat dalam Grafik 1.1 dibawah ini:

Grafik 1.1
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia Tahun 2010-2014

(Unit Usaha)



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2015 (diolah)

Menurut Badan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) ada beberapa provinsi yang memiliki sebaran IKM alas kaki yang berpotensi mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian, provinsi-provinsi tersebut masih didominasi berada di wilayah Pulau Jawa, hal ini dikarenakan Pulau Jawa memiliki letak geografis dan infrastruktur yang lebih baik dibanding pulau lainnya. Untuk lebih lengkapnya perhatikan Tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Sebaran Usaha Alas Kaki di Indonesia Tahun 2010

(persen)

Provinsi	Sebaran Usaha	Sebaran Tenaga Kerja
Jawa Barat	49,62	58,86
Jawa Timur	32,3	20,29
DKI Jakarta	4,75	7,98
Sumatera Utara	5,01	5,17
Jawa Tengah	3,74	3,67
Banten	1,3	1,69
Bali	1,53	1,11
Sumatera Barat	1,13	0,84
Yogyakarta	0,21	0,15
Aceh	0,19	0,09
Lainnya	0,22	0,15

Sumber : Peta Potensi dan Profil IKM Alas Kaki Nasional (BPIPI, 2012, hal. 16) (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki sebaran IKM alas kaki terbanyak di Indonesia, dengan sebaran usaha sebanyak 49,62 persen unit usaha menjadikan provinsi Jawa Barat kawasan paling potensial untuk pengembangan IKM alas kaki. Kawasan IKM alas kaki di Provinsi Jawa Barat juga memberikan andil dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dengan sebaran tenaga kerja sebanyak 58,86 persen. Hal ini berbeda dengan provinsi lainya yang memiliki sebaran tenaga kerja tidak jauh berbeda dari sebaran usahanya bahkan lebih sedikit dari sebaran usahanya. Seperti Provinsi Jawa Timur yang hanya memiliki sebaran tenaga kerja sebanyak 20,19 persen dibawah sebaran usahanya sebanyak 32,3 persen unit usaha.

Di Provinsi Jawa Barat sudah dibentuk beberapa sentra pengembangan IKM di beberapa tempat dengan didirikannya balai-balai pengembangan IKM, balai pengembangan IKM adalah unit pelaksana teknis bidang pengembangan dan pembinaan IKM di Jawa Barat, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat. Unit pengembangan ini memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dinas Perindag dibidang pengembangan dan pembinaan IKM di Provinsi Jawa Barat.

Balai pengembangan perindustrian membawahi sembilan sub unit dan satu rumah kemasan, dari sembilan sub unit pengembangan dan satu rumah kemasan satu-satunya unit pengembangan yang telah didirikan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat untuk IKM alas kaki adalah Unit Pengembangan IKM Persepatuan Cibaduyut. Industri alas kaki Cibaduyut sudah familiar dimata konsumen di Kota Bandung bahkan sampai luar kota, tidak heran karena alas kaki Cibaduyut memiliki harga murah tetapi kualitas bagus bahkan Presiden Ir. Joko Widodo pun memakai sepatu Cibaduyut.

Tabel 1.3
Balai Pengembangan Industri Kecil dan Mikro Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

No	Nama IKM	Alamat	Unit Usaha Dilayani
1	Sub Unit Pengembangan IKM Logam Bandung	Jln. Soekarno – Hatta Km 12,5 Kota	210
2	Sub Unit Pengembangan IKM Persepatuan Cibaduyut	Jln. Raya Cibaduyut No. 150 Kota Bandung	850
3	Sub Unit Pengembangan TPT Majalaya	Jln. Babakan No. 41 Majalaya Kab. Bandung	210
4	Sub Unit Pengembangan IKM Logam Sukabumi	Jln. Siliwangi No. 133 Cisaat Kab. Sukabumi	639
5	Sub Unit Pengembangan IKM Logam Bogor	Jl. Industri No.55 Ds.Tarikolot, Kec.Citireup Kab. Bogor	250
6	Sub Unit Pengembangan IKM Perkayuan Sumedang	Jln. Raya Legok – Conggeang Km. 1 Kab. Sumedang	90
7	Sub Unit Pengembangan Penyamakan Kulit Garut	Jln. Gagak Lumayung Km. 1,5 Sukaregang Kab.Garut	178
8	Sub Unit Pengembangan Kerajinan Tasikmalaya	Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 5 Kota Tasikmalaya	961
9	Sub Unit Pengembangan Rotan Cirebon	Jln. Tegal wamgi No.1 Kab. Cirebon	352
10	Rumah Kemasan	Jln. Parabon III No.1 Kota Bandung	256

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2014-2015 dalam (Disperindag, 2014)

Namun, disaat sekarang Indonesia akan menghadapi AEC industri alas kaki Cibaduyut mengalami berbagai permasalahan, mulai dari pengurangan tenaga kerja, penurunan hasil produksi, berkurangnya produsen dan struktur pasar yang kurang kondusif. Sebelumnya kawasan Cibaduyut, Kec. Bojongloa Kidul merupakan kawasan industri alas kaki yang cukup potensial untuk menambah daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaan kawasan sentra alas kaki ini tentu saja menjadi kebanggaan warga Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung karena kawasan ini merupakan satu-satunya sentra perajin

alas kaki di Kota Bandung. Disana pengunjung dapat membeli beraneka ragam sandal dan sepatu yang harganya jauh lebih murah dari tempat-tempat lain. Semakin lama kawasan industri alas kaki Cibaduyut berdiri, semakin banyak mengembangkan produk yang dijual, produk-produk lainnya yang kini dijual diantaranya adalah dompet, tas, topi, jaket dan ikat pinggang yang diproduksi dan dijual di kawasan sentra alas kaki Cibaduyut ini (Febrianto, 2014).

Industri alas kaki Cibaduyut kini diprediksi akan kalah bersaing dengan industri alas kaki dari negara lainnya, terutama negara-negara ASEAN yang menjadi pesaing utama dalam AEC. Permasalahan tersebut tentu akan berdampak pada kondisi perekonomian secara mikro maupun makro. Secara mikro, bila hasil produk Industri alas kaki Cibaduyut kalah bersaing dengan produksi impor baik secara kuantitas maupun kualitas, maka dalam perhelatan AEC industri alas kaki Cibaduyut hanya akan menjadi penonton saja, artinya hanya akan dijadikan pangsa pasar yang empuk bagi industri alas kaki dari negara lainnya, tentunya hal ini bila tidak segera diantisipasi akan berdampak pada skala makro.

Berdasarkan teori dari Michael Eugene Porter tentang keunggulan kompetitif *Diamond Porter's*, yang meliputi 4 faktor yaitu: (1) *Factor conditions*, mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal dan infrastruktur, (2) *Demand conditions*, mengacu pada tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing, (3) *Related and Supporting Industries*, mengacu pada tersedianya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan, hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan, dan (4) *Firm strategy, Structure and Rivalry*, mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada industri tertentu (Porter, 1993).

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap daya saing adalah tenaga kerja, tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi, dengan adanya tenaga kerja yang banyak dan juga kompetitif maka akan menciptakan hasil yang lebih baik. Tetapi, berbeda dengan keadaan jumlah tenaga kerja yang ada di industri alas kaki Cibaduyut yang setiap tahunnya semakin berkurang.

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Kerja Industri Alas Kaki Cibaduyut

<i>(orang/jiawa)</i>	
Tahun	Pekerja
2008	6045
2009	6045
2010	2851
2011	3468
2012	2719

Sumber : Harian Kompas 2014 dalam (Febrianto, 2014, hal. -)

Pada Tabel 1.3 diatas dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2009 tenaga kerja yang ada di industri alas kaki Cibaduyut semakin berkurang, meskipun ada kenaikan pada tahun 2011 dengan jumlah 3468 orang, tetapi sangat jauh penurunannya dari tahun 2009 sebanyak 6045 orang menjadi 2719 orang pada tahun 2012, ada sekitar 2577 orang yang keluar dari industri alas kaki Cibaduyut.

Selain tenaga kerja, modal juga merupakan faktor yang penting dengan tersedianya modal yang lebih besar akan menciptakan hasil produksi yang lebih banyak pula, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen lebih banyak yang akan dikonversi menjadi hasil penjualan/ laba yang lebih besar. Sumber modal di industri alas kaki Cibaduyut setiap tahunnya juga mengalami penurunan.

Tabel 1.4
Besaran Nilai Investasi di Industri Alas Kaki Cibaduyut

<i>(ribu rupiah)</i>	
Tahun	Nilai Investasi
2007	23.720.675
2008	23.720.675
2009	20.064.448
2010	19.004.956
2011	5.109.900

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kota Bandung dalam (Iqbal, 2013, hal. 4)

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dari mulai tahun 2007 nilai investasi modal di sentra industri alas kaki Cibaduyut mengalami penurunan, para investor semakin enggan untuk menanampakan modalnya di industri alas kaki Cibaduyut. Tentunya data tersebut menunjukkan adanya permasalahan, dengan semakin berkurangnya

nilai investasi akan berimbas pada hasil produksi. Seperti terjadi pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Produk Per Tahun yang Dihasilkan Alas Kaki Cibaduyut

<i>(pcs)</i>	
Tahun	Produk Per Tahun
2007	4.046.700
2008	4.092.300
2009	3.425.424
2010	3.114.022
2011	1.860.000

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kota Bandung dalam (Iqbal, 2013, hal. 5)

Pada Tabel 1.5 diatas menggambarkan bahwa sejak tahun 2008 hasil produksi industri alas kaki Cibaduyut mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan jumlah modal/ investasi yang setiap tahunnya sejak tahun 2007 mengalami penurunan. Disisi lain, jumlah pengunjung yang datang ke Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti digambarkan pada Tabel 1.6 dibawah ini:

Tabel 1.6
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik ke Kota Bandung

<i>(orang/jiwa)</i>	
Tahun	Wisatawan Domestik
2009	35.834.475
2010	34.647.240
2011	36.712.729
2012	39.467.642
2013	44.663.441

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandung 2013 dalam (Ramadhanita, 2014, hal. 2)

Bila jumlah pengunjung yang besar tersebut tidak terpenuhi kebutuhan alas kakinya dengan baik dikarenakan hasil produksinya yang tidak mencukupi maka sangat disayangkan. Sebuah peluang yang baik untuk menjadikan industri alas kaki Cibaduyut dapat bersaing dengan industri-industri alas kaki yang lainnya baik itu industri dalam negeri maupun asing.

Permasalahan tersebut belum selesai, kini sentra industri alas kaki Cibaduyut dihadapkan dengan kesepakatan AEC yang akan segera bergulir pada bulan Desember 2015. AEC yang seharusnya dapat menjadi peluang dengan prediksi jumlah wisatawan asing akan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut harus diimbangi dengan menciptakan produk yang memenuhi keinginan konsumen, baik itu dari kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas dan kualitas produk harus diciptakan lebih baik, dengan adanya jumlah produksi yang mencukupi dan kualitas yang baik maka dapat mendorong penciptaan daya saing yang tinggi.

Seiring dengan jumlah produksi yang semakin berkurang, masalah lainnya adalah adanya pengurangan jumlah produsen, pengurangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adanya pengurangan jumlah tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja juga bisa terjadi akibat adanya tuntutan gaji yang tinggi menyebabkan para produsen mengurangi jumlah tenaga kerjanya, dari pengurangan tenaga kerja tersebut akan berdampak pada hasil produksi sehingga sebagian distributor lebih memilih untuk gulung tikar atau menutup tokonya.

Tabel 1.7
Jumlah Produsen Alas Kaki Cibaduyut

<i>(unit)</i>	
Tahun	Jumlah Produsen
2008	861
2009	848
2010	845
2011	828
2012	828

Sumber: Ema Nur Arifah, Detik Bandung 2012 dalam (Febrianto, 2014)

Sementara itu, jumlah infrastruktur yang tersedia di industri alas kaki Cibaduyut belum memadai, masih harus ditambah dan diperbaiki bila ingin bersaing di AEC 2015. Berdasarkan Tabel 1.8 dibawah pada tahun 2012 dengan jumlah pengunjung yang banyak dan juga meningkat setiap tahunnya, hanya memiliki 176 *showroom/ outlet/ toko*, 4 pusat perdagangan dan lain sebagainya. Keadaan ini tentunya masih sangat kurang, pemerintah selaku penyedia sarana dan prasarana publik seharusnya dapat menyediakan infrastruktur yang lebih baik agar industri alas kaki Cibaduyut dapat bersaing di AEC 2015.

Tabel 1.8
Jumlah Infrastruktur yang Terdapat di Sentra Industri Alas Kaki
Cibaduyut Tahun 2012

No.	Fasilitas	Jumlah
1	Showroom/ outlet/toko	176
2	Pusat perdagangan	4
3	Toko bahan baku dan penunjang	38
4	Industri <i>shoelast</i>	8
5	Industri alat/ <i>sparepart</i>	3
6	Industri kemasan	15
7	Industri sol karet	5

Sumber: Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Alas Kaki Cibaduyut, 2013 dalam (Fauzi & Tjokropandojo, 2013, hal. 120)

Melihat berbagai permasalahan tersebut, Dinas Industri Mikro dan Kecil Provinsi Jawa Barat seharusnya lebih berbenah dengan ekstra, terlebih lagi para pengelola industri alas kaki Cibaduyut dalam menghadapi AEC 2015. Melihat data dan indikator teori *Diamond Porter's* yang sudah disampaikan diatas daya saing industri alas kaki Cibaduyut sangat rendah dan tidak menguntungkan bahkan cenderung memprihatinkan, baik itu dari sisi tenaga kerja, hasil produksi, infrastruktur dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini peneliti akan meneliti sebuah judul skripsi "***Analisis Daya Saing Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut Dalam Menghadapi Asian Economic Community 2015***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka penulis akan mengambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Factor Condition* dalam menghadapi AEC 2015?
- 1.2.2 Bagaimana daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Demand Condition* dalam menghadapi AEC 2015?
- 1.2.3 Bagaimana daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Related and Supporting Industry* dalam menghadapi AEC 2015?
- 1.2.4 Bagaimana daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Firm Strategy, Structur and Rivalty* dalam menghadapi AEC 2015

1.2.5 Bagaimana daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Government* dalam menghadapi AEC 2015?

1.2.6 Bagaimana daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Opportunities* dalam memenangkan AEC 2015?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Untuk mengetahui daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Factor Condition* dalam menghadapi AEC 2015.

1.3.2 Untuk mengetahui daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Demand Condition* dalam menghadapi AEC 2015.

1.3.3 Untuk mengetahui daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Related and Supporting Industry* dalam menghadapi AEC 2015.

1.3.4 Untuk mengetahui daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Firm Strategy, Structur and Rivalty* dalam menghadapi AEC 2015.

1.3.5 Untuk mengetahui daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Government* dalam menghadapi AEC 2015.

1.3.6 Untuk mengetahui daya saing sentra industri alas kaki Cibaduyut dilihat dari *Opportunities* dalam memenangkan AEC 2015.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pada beberapa instansi sebagai berikut:

1.4.1 Bagi akademisi, dengan adanya penelitian skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsi referensi informasi dan keilmuan supaya dapat memberikan masukan terhadap para pelaku ekonomi khususnya para pengelola sentra industri alas kaki Cibaduyut dalam menghadapi *ASEAN Economy Community 2015* sehingga akan siap menghadapinya dan tercipta daya saing yang tinggi.

1.4.2 Bagi Dinas Perindustrian Kecil dan Mikro, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan informasi atau data untuk

menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*. Sehingga Dinas Perindustrian Kecil dan Mikro akan lebih siap dan kompetitif.

Bagi pengelola industri alas kaki Cibaduyut, peneliti mempunyai harapan besar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan data dan informasi, sehingga dengan adanya penelitian ini para pengelola IKM alas kaki Cibaduyut khususnya lebih mengetahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam *ASEAN Economic Community 2015*.